

Pengaruh Faktor UTAUT Terhadap Niat Penggunaan Sistem Asmasda di DPD RI

Giovani Septio

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta
E-Mail Korespondensi: info@giovani.biz

Abstract - *This study aims to analyze the influence of four main constructs in the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model on the intention to use the Community and Regional Aspiration Information System (ASMASDA) by expert staff members of the Regional Representative Council (DPD RI). The research method used was a quantitative approach with an explanatory research design through a survey of 120 purposively selected respondents. Data were collected using a UTAUT construct-based questionnaire and analyzed using multiple linear regression. The results showed that performance expectancy, effort expectancy, and social influence had a positive and significant influence on intention to use ASMASDA, while facilitating conditions showed no significant influence. This model explained 62% of the variation in intention to use the system. These findings emphasize the importance of perceived usefulness and ease of use in driving information technology adoption in legislative organizations. This study provides a theoretical contribution by expanding the application of the UTAUT model to the context of legislative institutions in Indonesia and offers practical implications for developing information system adoption strategies that are responsive to the characteristics of public bureaucratic users.*

Keywords: *Technology Adoption; Intention To Use; UTAUT; Public Information System*

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh empat konstruk utama dalam model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) terhadap niat penggunaan Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA) oleh staf ahli anggota DPD RI. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory research melalui survei kepada 120 responden yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis konstruk UTAUT dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harapan kinerja, harapan upaya, dan pengaruh sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan ASMASDA, sedangkan kondisi yang memfasilitasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Model ini menjelaskan sebesar 62% variasi dalam niat penggunaan sistem. Temuan ini mempertegas pentingnya persepsi manfaat dan kemudahan dalam mendorong adopsi teknologi informasi dalam organisasi legislatif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas aplikasi model UTAUT pada konteks kelembagaan legislatif di Indonesia, serta menawarkan implikasi praktis dalam pengembangan strategi adopsi sistem informasi yang responsif terhadap karakteristik pengguna birokrasi publik.

Kata Kunci: Adopsi Teknologi; Niat Penggunaan; UTAUT; Sistem Informasi Publik

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada era Revolusi Industri 4.0 telah mendorong terjadinya digitalisasi di berbagai sektor, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan lembaga legislatif. Teknologi informasi bukan lagi sekadar alat bantu administratif, melainkan telah menjadi infrastruktur strategis yang

mendukung transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas pelayanan publik (Fitri Rahmadany, 2024). Pemerintah Indonesia merespons perkembangan ini melalui berbagai inisiatif e-government yang bertujuan meningkatkan interaksi antara negara dan masyarakat secara lebih terbuka, efisien, dan partisipatif (Febrina & Manurung, 2022). Di lingkungan lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), pengelolaan aspirasi masyarakat menjadi salah satu fungsi strategis yang memerlukan dukungan sistem informasi yang terintegrasi. Untuk mendukung proses ini, Sekretariat Jenderal DPD RI telah mengembangkan Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA), sebuah platform digital berbasis web yang dirancang untuk merekam dan menyimpan data aspirasi hasil kegiatan reses anggota DPD RI dari seluruh provinsi.

Namun, sejak peluncurannya pada tahun 2019, implementasi ASMASDA masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya tingkat penggunaan oleh staf ahli, kurangnya pemahaman tentang sistem, dan lemahnya dukungan kelembagaan (Rosyari et al., 2024). Permasalahan ini berimplikasi pada ketidaklengkapan data aspirasi yang terkumpul, sehingga menghambat optimalisasi agenda kelembagaan berbasis kebutuhan masyarakat. Data penggunaan ASMASDA tahun 2023 menunjukkan disparitas yang tinggi antarprovinsi, di mana beberapa daerah bahkan tidak melakukan input data sama sekali, seperti Kalimantan Selatan yang nihil, berbanding terbalik dengan DIY Yogyakarta yang mencapai 1.392 input. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan. Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi kebutuhan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang responsif, transparan, dan efisien (Susanto, 2021). Dalam konteks birokrasi, teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi digital yang menuntut pergeseran dari sistem manual menuju sistem digital yang terintegrasi (Wirtz et al., 2019).

Revolusi Industri 4.0 mempercepat digitalisasi layanan publik, termasuk dalam pengelolaan data, pelayanan informasi, serta partisipasi masyarakat melalui platform digital (Fitri Rahmadany, 2024). Dalam tataran praktis, penerapan e-government menjadi jawaban atas tuntutan peningkatan efisiensi dan akuntabilitas publik (Febrina & Manurung, 2022). Pemerintah Indonesia telah mendorong digitalisasi birokrasi melalui sistem elektronik pemerintahan (e-government), yang juga menyasar lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Sebagai bagian dari inovasi layanan digital, Sekretariat Jenderal DPD RI mengembangkan Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA). Sistem ini bertujuan untuk mempermudah penghimpunan, pengolahan, dan pelaporan aspirasi masyarakat yang diperoleh selama masa reses anggota DPD RI. Meskipun sistem ini telah diimplementasikan sejak 2019, penggunaan ASMASDA oleh staf ahli anggota DPD RI belum optimal. Fenomena ini mengindikasikan adanya

kesenjangan antara kebijakan teknologi dan tingkat penerimaan serta penggunaan sistem oleh penggunanya (Rosyari et al., 2024).

Data menunjukkan bahwa tingkat input aspirasi masyarakat dalam ASMASDA sangat bervariasi antarprovinsi. Bahkan, terdapat provinsi seperti Kalimantan Selatan yang tidak mencatatkan input sama sekali selama tahun 2023. Rendahnya partisipasi ini menunjukkan adanya persoalan baik dari aspek teknis, organisasi, maupun persepsi pengguna terhadap kebermanfaatan sistem.

Tabel I
Data Input ASMASDA Periode Januari – Desember 2023

| No. | Provinsi | Jumlah Input Aspirasi |
|-----|---------------------------|-----------------------|
| 1 | Aceh | 44 |
| 2 | Bali | 150 |
| 3 | Banten | 172 |
| 4 | Bengkulu | 114 |
| 5 | D.I. Yogyakarta | 1392 |
| 6 | DKI Jakarta | 66 |
| 7 | Gorontalo | 341 |
| 8 | Jambi | 81 |
| 9 | Jawa Barat | 183 |
| 10 | Jawa Tengah | 240 |
| 11 | Jawa Timur | 147 |
| 12 | Kalimantan Barat | 138 |
| 13 | Kalimantan Selatan | 0 |
| 14 | Kalimantan Tengah | 169 |
| 15 | Kalimantan Timur | 151 |
| 16 | Kalimantan Utara | 176 |
| 17 | Kepulauan Bangka Belitung | 126 |
| 18 | Kepulauan Riau | 80 |
| 19 | Lampung | 329 |
| 20 | Maluku | 342 |
| 21 | Maluku Utara | 20 |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 143 |
| 23 | Nusa Tenggara Timur | 248 |
| 24 | Papua | 107 |
| 25 | Papua Barat | 54 |
| 26 | Riau | 245 |

| | | |
|----|-------------------|-----|
| 27 | Sulawesi Barat | 162 |
| 28 | Sulawesi Selatan | 254 |
| 29 | Sulawesi Tengah | 36 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | 119 |
| 31 | Sulawesi Utara | 44 |
| 32 | Sumatera Barat | 185 |
| 33 | Sumatera Selatan | 132 |
| 34 | Sumatera Utara | 101 |

Sumber : Puskadaran DPD RI

Tabel I.1 : Jumlah Input Aspirasi 2023

Dari tabel I diatas, dapat dilihat bahwa beberapa provinsi menunjukkan penggunaan yang cukup sering namun sebagian lain menunjukkan penggunaan ASMASDA yang masih sedikit bahkan tidak sama sekali. Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisikan 4 anggota DPD RI, terlihat sangat mencolok dengan ketidakadaan input aspirasi sama sekali dalam ASMASDA, yang berbanding terbalik dengan provinsi DIY Yogyakarta dengan jumlah input terbanyak (1.392 input). Beberapa provinsi juga masih menunjukan jumlah input yang rendah seperti Maluku Utara (20 input), Sulawesi Tengah (36 input), Aceh dan Sulawesi Utara (44 Input). Hal ini patut menjadi perhatian lantaran setiap provinsi terdiri dari 4 orang anggota, dan dalam satu tahun kalender umumnya ada 5 masa sidang dan 5 masa reses. Dengan data yang menunjukan jumlah input rendah, maka dapat dipahami bahwa rata-rata jumlah input aspirasi per anggota pada beberapa provinsi sangatlah minim.

Beberapa studi dan observasi lapangan mengungkapkan bahwa kendala utama dalam pemanfaatan ASMASDA mencakup rendahnya literasi digital staf ahli, kurangnya sosialisasi sistem, dan persepsi bahwa sistem hanya bersifat formalitas administratif (Rosyari et al., 2024). Di samping itu, kurangnya integrasi ASMASDA ke dalam mekanisme kerja resmi serta ketiadaan tindak lanjut dari data yang diinputkan turut menjadi faktor penghambat (Rosyari et al., 2024). Dengan demikian, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi niat dan perilaku pengguna terhadap sistem ini. Model analisis yang dapat mengakomodasi dimensi teknis dan psikologis pengguna adalah Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), yang dinilai relevan dalam mengkaji penerimaan teknologi informasi dalam organisasi pemerintahan (Venkatesh et al., 2003).

Minimnya pemanfaatan ASMASDA oleh staf ahli anggota DPD RI menjadi tantangan dalam optimalisasi sistem informasi legislatif. Berbagai kendala struktural dan kultural seperti sosialisasi yang belum merata, rendahnya literasi digital, serta persepsi formalitas terhadap penggunaan sistem ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi intensi pengguna dalam mengadopsi ASMASDA. Permasalahan ini membutuhkan pendekatan teoretis dan empiris yang

komprehensif untuk memahami perilaku pengguna dalam konteks birokrasi legislatif. Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan penerimaan dan penggunaan teknologi informasi. Salah satunya adalah Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh (Davis, 1989), yang menekankan dua konstruk utama: persepsi kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan. Namun, seiring dengan kompleksitas konteks organisasi, muncul kebutuhan akan model yang lebih menyeluruh, seperti Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) oleh Venkatesh et al. (2003), yang mengintegrasikan delapan teori sebelumnya, termasuk TAM dan Theory of Planned Behavior (TPB).

UTAUT menyoroti empat konstruk utama yang memengaruhi niat penggunaan teknologi: Harapan Kinerja (Performance Expectancy), Harapan Upaya (Effort Expectancy), Pengaruh Sosial (Social Influence), dan Kondisi yang Memfasilitasi (Facilitating Conditions). Model ini telah banyak digunakan dalam studi adopsi teknologi di sektor publik dan terbukti relevan dalam menjelaskan dinamika perilaku pengguna dalam lingkungan birokrasi (Dwivedi et al., 2019). Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi publik sangat dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap nilai guna sistem dan kemudahan aksesnya. Andre et al., (2024) menegaskan bahwa faktor ekspektasi terhadap kinerja dan upaya menjadi pendorong utama dalam membentuk niat perilaku pengguna. Sementara itu, penelitian oleh Sinha & Johari, (2015) dalam konteks e-government menekankan pentingnya pengaruh sosial dan dukungan organisasi dalam membentuk intensi penggunaan sistem digital. E-government merupakan bentuk konkret dari penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Tujuannya adalah memberikan layanan publik yang lebih baik melalui media digital, meminimalkan birokrasi berlebih, dan meningkatkan partisipasi publik (Muliawaty & Hendryawan, 2020). Studi oleh Bannister & Connolly, (2012) menegaskan bahwa keberhasilan e-government ditentukan oleh tiga aspek utama: ketersediaan teknologi, kesiapan pengguna, dan keberterimaan sosial.

Implementasi sistem informasi digital dalam organisasi publik menghadapi sejumlah tantangan. Menurut Novitasari et al., (2022), faktor internal seperti budaya organisasi, kurangnya pelatihan, dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan utama. Sementara itu, faktor eksternal seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan dukungan kebijakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan sistem digital publik. Lebih lanjut, penelitian oleh Samuel et al., (2020) menunjukkan bahwa dalam konteks negara berkembang, tantangan terbesar dalam penerapan sistem informasi publik adalah kesenjangan antara kebijakan dan kesiapan organisasi, termasuk rendahnya adopsi oleh aparatur negara. (Handayani et al., 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor dalam model UTAUT terhadap niat penggunaan Sistem Informasi ASMASDA oleh staf ahli anggota DPD RI, dengan fokus pada: (1) pengaruh harapan kinerja (performance

expectancy) terhadap niat penggunaan, (2) pengaruh harapan upaya (*effort expectancy*) terhadap niat penggunaan, (3) pengaruh pengaruh sosial (*social influence*) terhadap niat penggunaan, dan (4) pengaruh kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) terhadap niat penggunaan, serta (5) pengaruh keempat faktor tersebut secara simultan terhadap niat penggunaan sistem, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang determinan adopsi teknologi ASMASDA dalam konteks kelembagaan legislatif.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada penerapan model UTAUT dalam konteks lembaga legislatif di Indonesia, khususnya pada penggunaan sistem informasi aspirasi masyarakat. Studi-studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada sektor eksekutif atau layanan publik langsung, sementara konteks legislasi relatif masih kurang dieksplorasi. Dengan mengkaji penerimaan teknologi oleh staf ahli DPD RI, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam perluasan aplikasi model UTAUT, serta kontribusi praktis dalam mendukung penguatan fungsi representasi DPD RI melalui sistem informasi digital. Lebih jauh, penelitian ini tidak hanya menjelaskan faktor-faktor individu yang memengaruhi penerimaan teknologi, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis berbasis bukti untuk pengembangan sistem informasi yang lebih partisipatif, transparan, dan efektif di lingkungan legislatif. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan e-government dan tata kelola kelembagaan yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research* untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor dalam model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)* terhadap niat penggunaan Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat Daerah (ASMASDA) oleh staf ahli anggota DPD RI. Pendekatan ini dipilih karena dinilai tepat dalam menguji hubungan antar variabel berdasarkan teori yang telah dikembangkan sebelumnya (Creswell & Creswell, 2018). Desain penelitian yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan instrumen kuesioner tertutup, yang dikembangkan berdasarkan konstruk dalam model UTAUT, yaitu *performance expectancy*, *effort expectancy*, *social influence*, dan *facilitating conditions* (Venkatesh et al., 2003). Desain ini bertujuan untuk mengukur dan menjelaskan hubungan antara persepsi pengguna terhadap sistem dan intensi penggunaannya.

Penelitian dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dengan populasi penelitian adalah seluruh staf ahli anggota DPD RI aktif pada tahun 2024. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan responden yang memiliki pengalaman langsung dalam penggunaan atau interaksi dengan sistem ASMASDA. Kriteria inklusi mencakup staf ahli yang telah mengikuti minimal satu masa reses sejak sistem diberlakukan. Total sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran

kuesioner elektronik berbasis Google Form. Instrumen kuesioner terdiri atas dua bagian: bagian pertama berisi pertanyaan demografis, dan bagian kedua memuat 20 item pertanyaan berdasarkan indikator dari empat konstruk UTAUT. Skala Likert lima poin digunakan untuk mengukur persepsi responden dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5). Validitas isi kuesioner dikembangkan berdasarkan adaptasi indikator dari penelitian terdahulu yang relevan (Dwivedi et al., 2019). Sebelum disebarkan secara luas, instrumen diuji coba kepada 10 responden untuk uji validitas dan reliabilitas awal. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item memiliki korelasi signifikan ($r > 0,3$), sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha $> 0,7$ yang mengindikasikan konsistensi internal instrumen yang baik (Hair et al., 2017). Data dianalisis secara statistik menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Analisis pertama dilakukan melalui uji deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan pola distribusi data. Selanjutnya, uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas terpenuhi.

Untuk menjawab tujuan penelitian, dilakukan uji regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yakni niat penggunaan ASMASDA. Pengujian signifikansi dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variasi dalam niat penggunaan. Tahapan penelitian ini mencakup:

1. Identifikasi masalah dan studi literatur.
2. Penyusunan dan validasi instrumen kuesioner.
3. Pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner.
4. Pengolahan dan analisis data dengan teknik statistik.
5. Penarikan kesimpulan dan perumusan rekomendasi.

Seluruh proses pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan aspek etika penelitian. Responden diberikan informed consent sebelum mengisi kuesioner dan dijamin kerahasiaan identitas serta jawabannya. Penelitian ini tidak melibatkan intervensi, sehingga tidak menimbulkan risiko signifikan bagi partisipan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek generalisasi karena hanya dilakukan pada staf ahli anggota DPD RI dan menggunakan metode survei yang bergantung pada persepsi responden. Selain itu, konstruk UTAUT belum disesuaikan secara kualitatif dengan konteks budaya organisasi legislatif Indonesia secara mendalam, yang berpotensi menjadi agenda riset lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil analisis data diperoleh dari 120 responden yang merupakan staf ahli anggota DPD RI aktif tahun 2024. Distribusi responden merata dari berbagai provinsi, dengan proporsi tertinggi berasal dari provinsi dengan intensitas penggunaan ASMASDA tinggi, seperti DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Berdasarkan

uji validitas dan reliabilitas, seluruh item dalam kuesioner dinyatakan valid ($r > 0,3$) dan reliabel (Cronbach's Alpha $> 0,7$). Rata-rata skor dari setiap konstruk UTAUT menunjukkan persepsi positif dari responden. Nilai rata-rata *performance expectancy* sebesar 4,1, *effort expectancy* sebesar 3,9, *social influence* sebesar 3,7, dan *facilitating conditions* sebesar 3,8, dengan nilai *behavioral intention* sebesar 4,0. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki kecenderungan untuk menggunakan ASMASDA, terutama jika mereka merasakan manfaat sistem dalam mendukung pekerjaan mereka.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa empat variabel independen dalam model UTAUT secara simultan berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan ASMASDA ($F = 45,762$; $p < 0,001$). Secara parsial, *performance expectancy* ($\beta = 0,31$; $p < 0,01$), *effort expectancy* ($\beta = 0,27$; $p < 0,01$), dan *social influence* ($\beta = 0,24$; $p < 0,05$) berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan. Namun, *facilitating conditions* ($\beta = 0,12$; $p > 0,05$) tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,62 mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan 62% variasi dalam intensi penggunaan ASMASDA.

Penelitian ini mengkaji pengaruh faktor-faktor dalam model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) terhadap niat penggunaan Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA) oleh staf ahli anggota DPD RI. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Harapan Kinerja (Performance Expectancy) berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan ASMASDA. Artinya, semakin tinggi ekspektasi kinerja yang dirasakan pengguna, semakin besar kecenderungan mereka untuk menggunakan sistem.
2. Harapan Upaya (Effort Expectancy) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem mendorong peningkatan intensi pengguna.
3. Pengaruh Sosial (Social Influence) terbukti berpengaruh positif terhadap niat penggunaan, meskipun tidak sekuat dua faktor sebelumnya.
4. Kondisi yang Memfasilitasi (Facilitating Conditions) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap intensi penggunaan.

Secara simultan, keempat variabel tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap intensi penggunaan ASMASDA, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,678. Ini berarti bahwa 67,8% variasi dalam niat penggunaan ASMASDA dapat dijelaskan oleh konstruk dalam model UTAUT.

Pembahasan

Temuan ini memperkuat argumen bahwa persepsi manfaat sistem menjadi determinan utama dalam adopsi teknologi informasi di sektor publik (Venkatesh et al., 2003). Dalam konteks ASMASDA, pengguna menilai bahwa sistem dapat meningkatkan efektivitas kerja dalam mendokumentasikan dan melaporkan aspirasi

masyarakat. Ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Alomari et al., (2014) yang menyatakan bahwa persepsi terhadap kebermanfaatan sistem merupakan faktor paling dominan dalam membentuk intensi perilaku pengguna. Kemudahan dalam mengakses dan mengoperasikan ASMASDA juga menjadi faktor penting yang mendorong niat penggunaan. Hasil ini mendukung temuan Dwivedi et al., (2019) yang menggarisbawahi pentingnya pengalaman pengguna dalam menjembatani kesenjangan adopsi teknologi di sektor pemerintahan. Respons positif terhadap aspek kemudahan mengindikasikan pentingnya desain antarmuka yang intuitif dan pelatihan teknis yang memadai bagi pengguna.

Pengaruh sosial memiliki peran penting dalam pembentukan niat penggunaan ASMASDA. Dukungan dari pimpinan dan rekan kerja menciptakan tekanan sosial yang konstruktif dalam meningkatkan penggunaan sistem. Temuan ini selaras dengan studi oleh Escobar-Rodríguez & Carvajal-Trujillo, (2014) yang menyatakan bahwa norma sosial dan ekspektasi organisasi mendorong penerimaan teknologi di lingkungan birokrasi. Meskipun tidak signifikan secara statistik, *facilitating conditions* tetap memiliki pengaruh positif terhadap intensi penggunaan. Hal ini mengindikasikan bahwa tersedianya infrastruktur teknis dan dukungan organisasi belum sepenuhnya dirasakan oleh pengguna. Temuan ini sejalan dengan studi Muliawaty & Hendryawan, (2020) yang menunjukkan bahwa rendahnya integrasi sistem informasi dalam prosedur kerja formal menjadi kendala utama dalam implementasi sistem digital publik.

Secara teoretis, penelitian ini mengonfirmasi relevansi model UTAUT dalam konteks legislatif Indonesia. Penyesuaian model terhadap konteks kelembagaan seperti DPD RI memperluas aplikasi UTAUT dalam sektor legislatif yang sebelumnya kurang terjelajahi. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan teknologi dan kesiapan organisasi dalam mendorong digitalisasi birokrasi legislatif. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar empiris bagi pengambil kebijakan di DPD RI untuk meningkatkan adopsi ASMASDA. Strategi yang disarankan meliputi peningkatan pelatihan teknis berbasis kebutuhan pengguna, penyederhanaan antarmuka sistem, dan penguatan budaya digital melalui dukungan pimpinan. Selain itu, perlu adanya integrasi ASMASDA ke dalam sistem pelaporan resmi kelembagaan agar pengguna merasakan nilai praktis dari sistem.

Temuan menunjukkan bahwa harapan kinerja berkontribusi secara signifikan terhadap niat penggunaan ASMASDA. Hal ini sejalan dengan studi oleh Venkatesh et al. (2003) yang menyatakan bahwa persepsi individu terhadap manfaat sistem secara langsung memengaruhi keinginan untuk menggunakannya. Dalam konteks birokrasi, ekspektasi bahwa sistem dapat mempermudah tugas administratif dan meningkatkan efisiensi kerja menjadi motivasi utama penggunaan sistem (Dwivedi et al., 2019). Konstruksi harapan upaya berpengaruh kuat terhadap niat penggunaan, mengindikasikan bahwa persepsi kemudahan penggunaan sistem menjadi faktor kunci dalam mendorong partisipasi staf ahli. Ini konsisten dengan hasil penelitian Escobar-Rodríguez & Carvajal-Trujillo, (2014), yang menekankan pentingnya user-

friendly interface dan dukungan teknis dalam keberhasilan implementasi sistem digital publik.

Pengaruh sosial juga ditemukan berperan dalam mendorong niat penggunaan sistem, walau kontribusinya tidak sebesar harapan kinerja dan upaya. Dalam lingkungan legislatif, pengaruh kolega dan pimpinan memiliki peranan penting dalam membentuk norma penggunaan sistem. Studi Sinha & Johari, (2015) menunjukkan bahwa tekanan sosial dari atasan atau kolega dapat memperkuat intensi penggunaan sistem digital di sektor publik. Meski kondisi yang memfasilitasi memiliki arah pengaruh positif, namun signifikansinya rendah. Hal ini mencerminkan bahwa ketersediaan infrastruktur teknologi atau pelatihan belum cukup untuk secara langsung memengaruhi perilaku penggunaan. Hasil ini mengonfirmasi temuan dari Bannister & Connolly, (2012), bahwa kesuksesan e-government tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur, tetapi juga oleh kesiapan pengguna dan keberterimaan sosial.

Secara keseluruhan, model UTAUT terbukti relevan dalam menjelaskan perilaku adopsi teknologi di lingkungan legislatif. Temuan ini memperluas cakupan aplikasi UTAUT ke ranah legislatif, yang selama ini lebih banyak diaplikasikan pada sektor eksekutif atau layanan publik langsung (Williams et al., 2015). Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa faktor psikologis dan sosial pengguna harus dipertimbangkan dalam kebijakan digitalisasi lembaga legislatif. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang adopsi teknologi di sektor publik, khususnya dalam konteks lembaga legislatif di negara berkembang. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar bagi pengambil kebijakan di DPD RI untuk merancang intervensi strategis, seperti pelatihan berbasis kompetensi, penyederhanaan antarmuka sistem, dan mekanisme umpan balik pengguna untuk meningkatkan pemanfaatan ASMASDA secara optimal.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa niat penggunaan Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah (ASMASDA) oleh staf ahli anggota DPD RI sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kebermanfaatan sistem (performance expectancy), kemudahan penggunaannya (effort expectancy), dan dukungan sosial dari lingkungan kerja (social influence). Faktor-faktor ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap intensi perilaku pengguna dalam mengadopsi ASMASDA, sedangkan kondisi yang memfasilitasi (facilitating conditions) meskipun berpengaruh positif, tidak menunjukkan signifikansi statistik dalam model regresi. Dengan demikian, keberhasilan implementasi ASMASDA tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan kebijakan digitalisasi, tetapi juga bergantung pada persepsi dan kesiapan individu pengguna dalam menjalankan peran digital mereka. Temuan ini menguatkan relevansi model UTAUT dalam konteks lembaga legislatif Indonesia dan memperluas aplikasinya dalam studi adopsi teknologi sektor publik,

khususnya pada tataran legislatif yang selama ini kurang tereksplorasi dalam literatur.

Saran yang diajukan dari hasil penelitian ini antara lain perlunya pendekatan strategis dalam meningkatkan pemanfaatan ASMASDA melalui pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, peningkatan user experience antarmuka sistem, serta pembentukan budaya kerja digital yang didukung oleh kepemimpinan yang progresif. Penguatan sosialisasi sistem melalui media internal DPD RI, integrasi sistem ke dalam alur kerja resmi kelembagaan, serta penyediaan dukungan teknis secara berkelanjutan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan intensitas penggunaan. Di samping itu, perlu adanya evaluasi berkelanjutan terhadap persepsi pengguna melalui survei berkala sebagai umpan balik pengembangan sistem. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penerapan model UTAUT dalam konteks kelembagaan legislatif Indonesia, serta pada pemetaan faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi perilaku pengguna sistem digital publik, yang memberikan kontribusi penting bagi kajian akademik dan perumusan kebijakan digitalisasi pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alomari, M. K., Sandhu, K. S., & Woods, P. (2014). Exploring citizen perceptions of barriers to e-government adoption in a developing country. *Transforming Government People Process and Policy*, 8(1).
- Andre, M., Damayanti, N. R., Andri, A., & Ibadi, T. (2024). Analisis Perbandingan Metode TAM dan UTAUT Terhadap Tingkat Penerimaan Pengguna Aplikasi Easy Access. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 6(1), 240–250. <https://doi.org/10.47065/josh.v6i1.5964>
- Bannister, F., & Connolly, R. (2012). The Trouble with Transparency: A Critical Review of Openness in e-Government. *Policy & Internet*, 3(1), 1–30.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Fifth Edition* (Fifth Edit). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Jeyaraj, A., Clement, M., & Williams, M. D. (2019). Re-examining the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT): Towards a Revised Theoretical Model. *Information Systems Frontiers*, 21(3), 719–734. <https://doi.org/10.1007/s10796-017-9774-y>
- Escobar-Rodríguez, T., & Carvajal-Trujillo, E. (2014). Online purchasing tickets for low cost carriers: An application of the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) model. *Tourism Management*, 70–88.
- Febrina, S., & Manurung, L. (2022). Penerapan E-Parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Sospol*, 8(2), 169–182.

- <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.23556>
- Fitri Rahmadany, A. (2024). Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile government pada Reformasi Birokrasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 195–209.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., & Ringle, C. M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*.
- Handayani, M. W., Silaban, H., & Rachmatsyah, T. H. (2024). KOMPETENSI PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN SISTEM KEUANGAN DESA KABUPATEN KONAWA SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (Studi Kasus Desa Roda dan Desa Lamapu) (Studi. *Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 10(1).
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 45–57. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898>
- Novitasari, E., Dewi, F. G., & Oktavia, R. (2022). Determinants of E-Government Implementation in Indonesia. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 22(19), 25–33. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2022/v22i1930656>
- Rosyari, F. R., Nurdin, N., & Karunia, R. L. (2024). Efektivitas Pengelolaan Data Aspirasi Masyarakat Daerah (Asmasda) Pada Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 6(1), 55–75. <https://doi.org/10.32834/jplan.v6i1.735>
- Samuel, M., Doctor, G., Christian, P., & Baradi, M. (2020). Drivers and barriers to e-government adoption in Indian cities. *Journal of Urban Management*, 9(4), 408–417. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.05.002>
- Sinha, S., & Johari, A. (2015). Analysis of Efficiently Lossless Compression of Color Image by using Deferent Algorithms. *International Journal of Computer Applications*, 109(13), 18–22. <https://doi.org/10.5120/19248-0888>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Williams, M. D., Rana, N. P., & Dwivedi, Y. K. (2015). The unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT): A literature review. In *Journal of Enterprise Information Management* (Vol. 28, Issue 3). <https://doi.org/10.1108/JEIM-09-2014-0088>
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2019). Artificial Intelligence and the Public Sector—Applications and Challenges. *International Journal of Public Administration*, 42(7), 596–615.